



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 106 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian dan pembagian ADD kepada setiap Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 -2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 26);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berkedudukan di wilayah kabupaten Barito Kuala.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

11. Rekening Kas Umum Negara, selanjutnya disebut RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral
12. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa, selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II PENGALOKASIAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) ADD adalah bagian dari pendapatan Desa yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Barito Kuala setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) ADD dialokasikan kepada Desa dalam rangka membantu capaian program Pemerintah Desa dan untuk percepatan pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 3

- (1) ADD sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) merupakan bagian dari Anggaran Belanja Daerah pada pos Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yang peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
- (2) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa dan merupakan bagian dari APBDesa.

Pasal 4

Penganggaran bantuan keuangan ADD kepada Pemerintah Desa pada APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 64.248.384.300,- (enam puluh empat milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

BAB III TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN

Pasal 5

- (1) ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dibagi kepada 195 (seratus sembilan puluh lima) Desa di Kabupaten Barito Kuala dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, tingkat kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan keterjangkauan Desa.
- (2) Perhitungan besaran ADD untuk setiap Desa berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memperhitungkan kebutuhan tunjangan dan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, serta honorarium dan jaminan sosial ketenagakerjaan Staf Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran.

- (3) Alokasi anggaran untuk perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi secara proporsional setelah dikurangi kebutuhan anggaran untuk belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2).

Pasal 6

- (1) Besaran ADD dihitung dengan rumus, yaitu :

$$ADDx = ADDBPx + ADDPx$$

ADDx = Alokasi Dana Desa untuk Desa x
 ADDBPx = Alokasi Dana Desa untuk Belanja Pegawai Desa x
 ADDPx = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

- (2) Besaran ADD untuk Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Staf Desa, dan Insentif RT/RW ditetapkan tersendiri dalam peraturan Bupati.
 (3) Besaran Alokasi Dana Desa Proporsional untuk setiap Desa dihitung dengan rumus, yaitu :

$$ADDPx = \frac{BDx}{\sum BD} \times (ADDP)$$

ADDPx = Alokasi Dana Desa Proporsional desa x
 BDx = Nilai Bobot Desa x
 $\sum BD$ = Jumlah Seluruh Nilai Bobot Desa
 ADDP = Jumlah Alokasi Dana Desa proporsional Kabupaten

- (4) Penentuan Nilai Bobot Desa di hitung dengan rumus, yaitu :

$$BDx = a1.KVx + a2.KV2x + a3.KV3x + ... + an.KVnx$$

BDx = Nilai Bobot Desa x
 a1,a2,...,an = Angka Bobot masing-masing Variabel
 KV = Koefisien Variabel pertama, kedua, ketiga dan seterusnya

- (5) Penetapan Rincian ADD dan penghitungan pembagian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Barito Kuala ini.

Pasal 7

- (1) Pendapatan ADD bagi setiap Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang wajib dianggarkan pada pendapatan APBDesa tahun 2021.
 (2) Penganggaran belanja yang didanai dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPDesa tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa.
 (3) Apabila terjadi perubahan besaran ADD maka APBDesa harus menyesuaikan dengan melakukan perubahan APBDesa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN

Pasal 8

- (1) Prioritas ADD digunakan untuk mendanai program dan kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan desa.
- (2) Prioritas ADD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi kegiatan antara lain :
 - a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. Penyediaan operasional Pemerintah Desa;
 - e. Penyediaan tunjangan BPD;
 - f. Penyediaan operasional BPD;
 - g. Penyediaan Honorarium dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKK-JKM) bagi Staf Desa;
 - h. Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pemilihan Kepala Desa;
 - i. Penyediaan insentif/operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - j. Penyelenggaraan Lomba Desa; dan
 - k. Kegiatan pada sub bidang penyediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.
- (3) Dalam hal ketersediaan ADD tidak mencukupi untuk mendanai penyediaan insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dapat dipenuhi dari sumber dana selain ADD.

Pasal 9

- (1) Selain digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), ADD dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Teknis Kegiatan prioritas yang didanai dari ADD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pedoman penyusunan APBDesa.

BAB V TATA CARA PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam rangka penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa membuka RKD pada bank pemerintah terdekat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli dan paling lambat minggu keempat bulan November sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penyaluran ADD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dana perimbangan ditransfer dari RKUN ke RKUD.
- (3) Penyaluran ADD dilaksanakan berdasarkan surat permohonan dari Kepala Desa dan ditujukan kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD tahap I, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan menyampaikan :
 - a. peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya;
 - c. peraturan Desa tentang APBDesa;
 - d. peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa; dan
 - e. dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana anggaran kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD tahap II, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I.
- (3) Penyaluran ADD tahap III, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penggunaan ADD tahap II.
- (4) Penyaluran ADD setiap tahapan sebagaimana ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan dokumen pencairan sebagai berikut :
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa kepada Camat
 - b. surat permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Bupati;
 - c. kwitansi pencairan ADD sesuai tahapan (bermaterai);
 - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (bermaterai);
 - e. pakta integritas (bermaterai); dan
 - f. surat pernyataan penggunaan ADD

Pasal 13

- (1) Berdasarkan permohonan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4), Tim Fasilitasi PKD Kecamatan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pencairan dan pemeriksaan SPJ untuk kelengkapan berkas permohonan pencairan Desa yang bersangkutan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan dilampiri :
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. surat permohonan pencairan dari Pemerintah Desa beserta lampirannya;
 - c. lembar ceklis kelengkapan dokumen pencairan dari Tim Fasilitasi PKD Kecamatan; dan
 - d. lembar pemeriksaan SPJ ADD
- (2) Berdasarkan surat pengantar pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala menerbitkan surat pengantar pencairan ADD kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan dilampiri :
 - a. surat permohonan pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa;

- b. ceklist kelengkapan dokumen pencairan dari Tim fasilitasi PKD Kecamatan;
 - c. kwitansi pencairan ADD sesuai tahapan (bermaterai)
 - d. surat pernyataan penggunaan ADD;
 - e. pakta integritas (bermaterai);
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (bermaterai); dan
 - g. print out rekening koran
- (3) Pengajuan pencairan ADD tahap II dan III dapat dilaksanakan Desa apabila telah mempertanggungjawabkan dana tahap sebelumnya sebesar minimal 90 % (sembilan puluh persen) dengan dilampiri laporan realisasi fisik dan keuangan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2021 terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD setiap tahap penyaluran kepada Bupati
- (4) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD sesuai tahapan.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari Kepala Desa kepada Camat cq. Tim Fasilitasi PKD Kecamatan paling lambat minggu kedua tahun berikutnya.
- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari Kepala desa kepada Camat cq. Tim Fasilitasi PKD Kecamatan sesuai tahapan pengajuan penyaluran ADD.
- (7) Tim Fasilitasi Kecamatan membuat rekapitulasi seluruh laporan dari tingkat Desa di wilayah kecamatan secara bertahap dilampiri laporan dari tingkat desa, dilaporkan kepada Bupati cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk laporan bulanan setiap minggu kedua bulan berikutnya dan untuk laporan akhir tahun paling lambat minggu kedua bulan januari tahun berikutnya.
- (8) Apabila Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pembina dan Pengawas Pengelolaan Keuangan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD secara langsung pada Desa yang bersangkutan.
- (9) Pelaporan ini diperlukan dalam rangka pengendalian dana untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD yang meliputi :
 - a. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
 - b. masalah yang dihadapi; dan
 - c. hasil akhir penggunaan ADD.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan ADD. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat berwenang dan oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. pada organisasi Pemerintah Desa secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali Kepala Desa melaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi keuangan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- c. diluar organisasi Pemerintah Desa, pengawasan dilakukan oleh :
 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
 2. Inspektorat Kabupaten sebagai aparat pengawasan internal Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.
 3. Camat berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 16

Pelayanan informasi mengenai ADD Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Barito Kuala, sebagai berikut :

- a. mengenai program dan kegiatan pada Badan Penelitian Pengembangan Pembangunan (Bapelitbang) Kabupaten Barito Kuala.
- b. mengenai sistem pertanggungjawaban keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Kuala.
- c. mengenai pembinaan administrasi, pelatihan, monitoring laporan hasil kinerja pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala.
- d. pemantauan/pengawasan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa serta mekanisme pencairan dan laporan keuangan oleh Camat dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada kecamatan setempat.
- e. pemeriksaan hasil pembangunan dan keuangan pada Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 17

- (1) Dalam hal sampai dengan minggu keempat bulan November tahun anggaran berjalan, Desa belum mengajukan permohonan pencairan ADD, sisa dana ADD tersebut tidak bisa dicairkan lagi ke RKD dan tidak bisa dianggarkan kembali pada pendapatan Desa tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal sampai dengan akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan pelaksanaan kegiatan belum selesai atau belum mencapai 100% dan terdapat Silpa ADD di RKD, Kepala Desa wajib menganggarkan kembali pada rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Silpa ADD tersebut.
- (3) Silpa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Rencana Anggaran Kas telah ditetapkan.

- (4) Sisa Lebih Perhitungan ADD tahun anggaran 2021 dapat digunakan untuk :
- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa tidak diperbolehkan menyimpan/membawa dana ADD dan tidak dibenarkan membuka rekening bank selain RKD yang sudah dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Kaur Keuangan wajib memungut pajak-pajak Negara dan pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku dan menyetorkan pungutan pajak Negara ke Kas Negara dan pajak Daerah ke Kas Daerah.
- (3) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (4) Penyimpanan uang tunai oleh kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selambat lambatnya pada minggu ke empat bulan Desember wajib disetorkan kembali ke RKD.
- (5) Kegiatan pembangunan fisik desa harus dilampiri dengan data dukung foto kegiatan mulai 0 %, 50 % dan 100 %;
- (6) ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik praktis, kegiatan melawan hukum dan tidak diperbolehkan tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah dibiayai dari sumber yang lain;
- (7) Anggaran ADD terintegrasi dalam APBDesa dan Pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam penggunaan ADD dapat dikenakan Sanksi dengan mempedomani ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 19

Format lembar ceklis kelengkapan dokumen pencairan desa dan lembar pemeriksaan SPJ desa dari Tim Fasilitasi PKD kecamatan, surat pertanggungjawaban mutlak telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban ADD tahun sebelumnya, surat pengantar dari desa ke Dinas PMD, surat permohonan pencairan ADD, kwitansi pencairan ADD sesuai tahapan (bermaterai), surat pernyataan penggunaan ADD (bermaterai), surat pernyataan tanggung jawab mutlak (bermaterai), pakta integritas (bermaterai) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VIII PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 70)

Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 28 Desember 2020



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 28 Desember 2020



Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

H. ABDUL MANAF
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 106

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 106 Tahun 2020
Tanggal 28 Desember 2020

**PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
BAGI DESA SE KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
				20%	40%	40%
1	TABUNGANEN	KUALA LUPAK	316,913,800	63,382,760	126,765,520	126,765,520
2	TABUNGANEN	SUNGAI TELAN BESAR	312,839,300	62,567,860	125,135,720	125,135,720
3	TABUNGANEN	SUNGAI TELAN KECIL	310,802,100	62,160,420	124,320,840	124,320,840
4	TABUNGANEN	TABUNGANEN MUARA	312,839,300	62,567,860	125,135,720	125,135,720
5	TABUNGANEN	TABUNGANEN TENGAH	312,839,300	62,567,860	125,135,720	125,135,720
6	TABUNGANEN	KARYA BARU	312,839,300	62,567,860	125,135,720	125,135,720
7	TABUNGANEN	TABUNGANEN PEMURUS	396,625,000	79,325,000	158,650,000	158,650,000
8	TABUNGANEN	SUNGAI TERAS DALAM	310,802,100	62,160,420	124,320,840	124,320,840
9	TABUNGANEN	SUNGAI JINGAH BESAR	308,764,900	61,752,980	123,505,960	123,505,960
10	TABUNGANEN	TABUNGANEN KECIL	364,838,800	72,967,760	145,935,520	145,935,520
11	TABUNGANEN	SEI TERAS LUAR	310,802,100	62,160,420	124,320,840	124,320,840
12	TABUNGANEN	SEI TELAN MUARA	306,727,600	61,345,520	122,691,040	122,691,040
13	TABUNGANEN	BERINGIN KENCANA	312,839,300	62,567,860	125,135,720	125,135,720
14	TABUNGANEN	TANGGUL REJO	372,987,700	74,597,540	149,195,080	149,195,080
15	TAMBAN	PURWOSARI II	364,838,800	72,967,760	145,935,520	145,935,520
16	TAMBAN	PURWOSARI I	379,713,300	75,942,660	151,885,320	151,885,320
17	TAMBAN	TAMBAN BANGUN	321,602,100	64,320,420	128,640,840	128,640,840
18	TAMBAN	TAMBAN MUARA	370,950,500	74,190,100	148,380,200	148,380,200
19	TAMBAN	TAMBAN KECIL	310,802,100	62,160,420	124,320,840	124,320,840
20	TAMBAN	TINGGIRAN II LUAR	394,587,700	78,917,540	157,835,080	157,835,080
21	TAMBAN	JELAPAT I	396,625,000	79,325,000	158,650,000	158,650,000
22	TAMBAN	TAMBAN MUARA BARU	316,913,800	63,382,760	126,765,520	126,765,520
23	TAMBAN	PURWOSARI BARU	323,639,300	64,727,860	129,455,720	129,455,720
24	TAMBAN	SEKATA BARU	308,764,900	61,752,980	123,505,960	123,505,960
25	TAMBAN	KOANDA	306,727,600	61,345,520	122,691,040	122,691,040
26	TAMBAN	DAMSARI	308,764,900	61,752,980	123,505,960	123,505,960
27	TAMBAN	SIDOREJO	310,802,100	62,160,420	124,320,840	124,320,840
28	TAMBAN	JELAPAT BARU	381,750,500	76,350,100	152,700,200	152,700,200
29	TAMBAN	TAMBAN BANGUN BARU	308,764,900	61,752,980	123,505,960	123,505,960
30	TAMBAN	TAMBAN SARI BARU	312,839,300	62,567,860	125,135,720	125,135,720
31	ANJIR PASAR	ANDAMAN	312,839,300	62,567,860	125,135,720	125,135,720
32	ANJIR PASAR	HILIR MESJID	308,764,900	61,752,980	123,505,960	123,505,960
33	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR KOTA	366,876,000	73,375,200	146,750,400	146,750,400
34	ANJIR PASAR	BANYIUR	310,802,100	62,160,420	124,320,840	124,320,840
35	ANJIR PASAR	GANDARAYA	312,839,300	62,567,860	125,135,720	125,135,720
36	ANJIR PASAR	GANDARIA	308,764,900	61,752,980	123,505,960	123,505,960
37	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR KOTA II	379,713,300	75,942,660	151,885,320	151,885,320
38	ANJIR PASAR	ANDAMAN II	310,802,100	62,160,420	124,320,840	124,320,840
39	ANJIR PASAR	ANJIR SEBERANG PASAR II	316,913,800	63,382,760	126,765,520	126,765,520
40	ANJIR PASAR	ANJIR SEBERANG PASAR I	318,951,000	63,790,200	127,580,400	127,580,400
41	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR LAMA	381,750,500	76,350,100	152,700,200	152,700,200
42	ANJIR PASAR	PANDAN SARI	312,839,300	62,567,860	125,135,720	125,135,720
43	ANJIR PASAR	MENTAREN	312,839,300	62,567,860	125,135,720	125,135,720
44	ANJIR PASAR	BARUNAI BARU	308,764,900	61,752,980	123,505,960	123,505,960
45	ANJIR PASAR	DANAU KARYA	310,802,100	62,160,420	124,320,840	124,320,840

46	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT MUARA	310,802,100	62,160,420	124,320,840	124,320,840
47	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA KOTA	375,638,800	75,127,760	150,255,520	150,255,520
48	ANJIR MUARA	PATIH MUHUR	308,764,900	61,752,980	123,505,960	123,505,960
49	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA KOTA TENGAH	385,825,000	77,165,000	154,330,000	154,330,000
50	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT LAMA	308,764,900	61,752,980	123,505,960	123,505,960
51	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT BARU	314,876,500	62,975,300	125,950,600	125,950,600
52	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA LAMA	366,876,000	73,375,200	146,750,400	146,750,400
53	ANJIR MUARA	SUNGAI PUNGGU	312,839,300	62,567,860	125,135,720	125,135,720
54	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT BARU I	312,839,300	62,567,860	125,135,720	125,135,720
55	ANJIR MUARA	PATIH MUHUR BARU	306,727,600	61,345,520	122,691,040	122,691,040
56	ANJIR MUARA	SEI PUNGGU BARU	312,839,300	62,567,860	125,135,720	125,135,720
57	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT MUARA I	323,639,300	64,727,860	129,455,720	129,455,720
58	ANJIR MUARA	SEPAKAT BARSAMA	308,764,800	61,752,960	123,505,920	123,505,920
59	ANJIR MUARA	MARABAHAN BARU	308,764,900	61,752,980	123,505,960	123,505,960
60	ANJIR MUARA	BERINGIN JAYA	308,764,800	61,752,960	123,505,920	123,505,920
61	ALALAK	PULAU ALALAK	334,439,300	66,887,860	133,775,720	133,775,720
62	ALALAK	PULAU SEWANGI	323,639,300	64,727,860	129,455,720	129,455,720
63	ALALAK	PULAU SUGARA	323,639,300	64,727,860	129,455,720	129,455,720
64	ALALAK	SUNGAI LUMBAH	381,750,500	76,350,100	152,700,200	152,700,200
65	ALALAK	BERANGAS TIMUR	394,587,700	78,917,540	157,835,080	157,835,080
66	ALALAK	SEI SEMANGAT BHAKTI	316,913,800	63,382,760	126,765,520	126,765,520
67	ALALAK	SUNGAI PITUNG	310,802,100	62,160,420	124,320,840	124,320,840
68	ALALAK	BELANDEAN MUARA	308,764,800	61,752,960	123,505,920	123,505,920
69	ALALAK	BELANDEAN	310,802,100	62,160,420	124,320,840	124,320,840
70	ALALAK	TANJUNG HARAPAN	308,764,800	61,752,960	123,505,920	123,505,920
71	ALALAK	SEMANGAT DALAM	394,587,700	78,917,540	157,835,080	157,835,080
72	ALALAK	BERINGIN	392,550,400	78,510,080	157,020,160	157,020,160
73	ALALAK	SEMANGAT KARYA	316,913,800	63,382,760	126,765,520	126,765,520
74	ALALAK	PANCA KARYA	310,802,100	62,160,420	124,320,840	124,320,840
75	ALALAK	TATAH MESJID	342,588,200	68,517,640	137,035,280	137,035,280
76	MANDASTANA	TERANTANG	327,713,800	65,542,760	131,085,520	131,085,520
77	MANDASTANA	TANIPAH	308,764,800	61,752,960	123,505,920	123,505,920
78	MANDASTANA	PUNTIK LUAR	310,802,100	62,160,420	124,320,840	124,320,840
79	MANDASTANA	PUNTIK DALAM	312,839,300	62,567,860	125,135,720	125,135,720
80	MANDASTANA	TABING RIMBAH	381,750,500	76,350,100	152,700,200	152,700,200
81	MANDASTANA	PANTAI HAMBAWANG	316,913,800	63,382,760	126,765,520	126,765,520
82	MANDASTANA	TATAH ALAYUNG	308,764,800	61,752,960	123,505,920	123,505,920
83	MANDASTANA	PUNTIK TENGAH	368,913,300	73,782,660	147,565,320	147,565,320
84	MANDASTANA	LOKRAWA	308,764,800	61,752,960	123,505,920	123,505,920
85	MANDASTANA	SEI RAMANIA	312,839,300	62,567,860	125,135,720	125,135,720
86	MANDASTANA	BANGKIT BARU	308,764,800	61,752,960	123,505,920	123,505,920
87	MANDASTANA	ANTASAN SEGERA	308,764,800	61,752,960	123,505,920	123,505,920
88	MANDASTANA	KARANG BUNGA	321,602,100	64,320,420	128,640,840	128,640,840
89	MANDASTANA	KARANG INDAH	366,876,000	73,375,200	146,750,400	146,750,400
90	RANTAU BADAUH	SUNGAI PANTAI	383,787,700	76,757,540	153,515,080	153,515,080
91	RANTAU BADAUH	PINDAHAN BARU	372,987,700	74,597,540	149,195,080	149,195,080
92	RANTAU BADAUH	SUNGAI GAMPA ASAHI	375,025,000	75,005,000	150,010,000	150,010,000
93	RANTAU BADAUH	SUNGAI GAMPA	381,750,500	76,350,100	152,700,200	152,700,200
94	RANTAU BADAUH	SUNGAI SAHURAI	314,876,500	62,975,300	125,950,600	125,950,600
95	RANTAU BADAUH	SIMPANG ARJA	314,876,500	62,975,300	125,950,600	125,950,600
96	RANTAU BADAUH	SINAR BARU	312,839,300	62,567,860	125,135,720	125,135,720
97	RANTAU BADAUH	SUNGAI BAMBAN	372,987,700	74,597,540	149,195,080	149,195,080
98	RANTAU BADAUH	DANDA JAYA	394,587,700	78,917,540	157,835,080	157,835,080
99	BELAWANG	MURUNG KERAMAT	312,839,300	62,567,860	125,135,720	125,135,720
100	BELAWANG	SUNGAI SELUANG	308,764,800	61,752,960	123,505,920	123,505,920
101	BELAWANG	BELAWANG	368,913,300	73,782,660	147,565,320	147,565,320
102	BELAWANG	BAMBANGIN	306,727,600	61,345,520	122,691,040	122,691,040

103	BELAWANG	SUKARAMAI	308,764,800	61,752,960	123,505,920	123,505,920
104	BELAWANG	SUNGAI SELUANG PASAR	366,876,000	73,375,200	146,750,400	146,750,400
105	BELAWANG	SAMUDA	310,802,100	62,160,420	124,320,840	124,320,840
106	BELAWANG	PARIMATA	308,764,800	61,752,960	123,505,920	123,505,920
107	BELAWANG	KARANG DUKUH	310,802,100	62,160,420	124,320,840	124,320,840
108	BELAWANG	PATIH SELERA	312,839,300	62,567,860	125,135,720	125,135,720
109	BELAWANG	KARANG BUAH	306,727,600	61,345,520	122,691,040	122,691,040
110	BELAWANG	BINAAN BARU	308,764,800	61,752,960	123,505,920	123,505,920
111	BELAWANG	RANGGA SURYA	310,802,100	62,160,420	124,320,840	124,320,840
112	CERBON	SUNGAI KAMBAT	312,839,300	62,567,860	125,135,720	125,135,720
113	CERBON	SUNGAI RASAU	312,839,300	62,567,860	125,135,720	125,135,720
114	CERBON	SIMPANG NUNGKI	312,839,300	62,567,860	125,135,720	125,135,720
115	CERBON	SAWAHAN	318,951,000	63,790,200	127,580,400	127,580,400
116	CERBON	BANTUIL	381,750,500	76,350,100	152,700,200	152,700,200
117	CERBON	BADANDAN	310,802,100	62,160,420	124,320,840	124,320,840
118	CERBON	SEI TUNJANG	308,764,800	61,752,960	123,505,920	123,505,920
119	CERBON	SEI RAYA	308,764,800	61,752,960	123,505,920	123,505,920
120	BAKUMPAI	BANUA ANYAR	310,802,100	62,160,420	124,320,840	124,320,840
121	BAKUMPAI	MURUNG RAYA	310,802,100	62,160,420	124,320,840	124,320,840
122	BAKUMPAI	PALINGKAU	323,025,500	64,605,100	129,210,200	129,210,200
123	BAKUMPAI	BALUKUNG	314,876,500	62,975,300	125,950,600	125,950,600
124	BAKUMPAI	BANITAN	314,876,500	62,975,300	125,950,600	125,950,600
125	BAKUMPAI	BATIK	308,764,800	61,752,960	123,505,920	123,505,920
126	BAKUMPAI	BAHALAYUNG	308,764,800	61,752,960	123,505,920	123,505,920
127	BAKUMPAI	SUNGAI SELIRIK	314,876,500	62,975,300	125,950,600	125,950,600
128	KURIPAN	JAMBU BARU	325,062,700	65,012,540	130,025,080	130,025,080
129	KURIPAN	JAMBU	314,876,500	62,975,300	125,950,600	125,950,600
130	KURIPAN	KABUAU	316,913,800	63,382,760	126,765,520	126,765,520
131	KURIPAN	JARENANG	310,802,100	62,160,420	124,320,840	124,320,840
132	KURIPAN	TABATAN	320,988,200	64,197,640	128,395,280	128,395,280
133	KURIPAN	KURIPAN	310,802,100	62,160,420	124,320,840	124,320,840
134	KURIPAN	TABATAN BARU	320,988,200	64,197,640	128,395,280	128,395,280
135	KURIPAN	ASIA BARU	314,876,500	62,975,300	125,950,600	125,950,600
136	KURIPAN	RIMBUN TULANG	308,764,800	61,752,960	123,505,920	123,505,920
137	TABUKAN	PANTANG RAYA	312,839,300	62,567,860	125,135,720	125,135,720
138	TABUKAN	TABUKAN RAYA	366,876,000	73,375,200	146,750,400	146,750,400
139	TABUKAN	TELUK TAMBA	368,913,300	73,782,660	147,565,320	147,565,320
140	TABUKAN	RANTAU BAMBAN	310,802,000	62,160,400	124,320,800	124,320,800
141	TABUKAN	TAMBA JAYA	312,839,300	62,567,860	125,135,720	125,135,720
142	TABUKAN	MUARA PULAU	323,025,500	64,605,100	129,210,200	129,210,200
143	TABUKAN	KARYA INDAH	316,913,800	63,382,760	126,765,520	126,765,520
144	TABUKAN	BANDAR KARYA	306,727,600	61,345,520	122,691,040	122,691,040
145	TABUKAN	KARYA MAKMUR	310,802,100	62,160,420	124,320,840	124,320,840
146	TABUKAN	KARYA JADI	366,876,000	73,375,200	146,750,400	146,750,400
147	TABUKAN	PANTANG BARU	308,764,800	61,752,960	123,505,920	123,505,920
148	MEKARSARI	MEKARSARI	392,550,500	78,510,100	157,020,200	157,020,200
149	MEKARSARI	TAMBAN RAYA	325,676,500	65,135,300	130,270,600	130,270,600
150	MEKARSARI	TINGGIRAN TENGAH	310,802,100	62,160,420	124,320,840	124,320,840
151	MEKARSARI	TINGGIRAN DARAT	325,676,500	65,135,300	130,270,600	130,270,600
152	MEKARSARI	JELAPAT II	316,913,800	63,382,760	126,765,520	126,765,520
153	MEKARSARI	TAMBAN RAYA BARU	314,876,500	62,975,300	125,950,600	125,950,600
154	MEKARSARI	TINGGIRAN BARU	336,476,500	67,295,300	134,590,600	134,590,600
155	MEKARSARI	KARANG MEKAR	310,802,100	62,160,420	124,320,840	124,320,840
156	MEKARSARI	INDAH SARI	306,727,600	61,345,520	122,691,040	122,691,040
157	BARAMBAI	BARAMBAI	370,950,500	74,190,100	148,380,200	148,380,200
158	BARAMBAI	SUNGAI KALI	372,987,700	74,597,540	149,195,080	149,195,080
159	BARAMBAI	PENDALAMAN	310,802,100	62,160,420	124,320,840	124,320,840

160	BARAMBAI	HANDIL BARABAI	306,727,600	61,345,520	122,691,040	122,691,040
161	BARAMBAI	BAGAGAP	314,876,500	62,975,300	125,950,600	125,950,600
162	BARAMBAI	BARAMBAI KARYA TANI	314,876,500	62,975,300	125,950,600	125,950,600
163	BARAMBAI	PENDALAMAN BARU	310,802,100	62,160,420	124,320,840	124,320,840
164	BARAMBAI	KARYA BARU	314,876,500	62,975,300	125,950,600	125,950,600
165	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KIRI	381,750,500	76,350,100	152,700,200	152,700,200
166	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KANAN	312,839,300	62,567,860	125,135,720	125,135,720
167	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KIRI DALAM	370,950,500	74,190,100	148,380,200	148,380,200
168	MARABAHAN	PENGHULU	364,838,800	72,967,760	145,935,520	145,935,520
169	MARABAHAN	BAGUS	370,950,500	74,190,100	148,380,200	148,380,200
170	MARABAHAN	BALIUK	306,727,600	61,345,520	122,691,040	122,691,040
171	MARABAHAN	ANTAR BARU	310,802,100	62,160,420	124,320,840	124,320,840
172	MARABAHAN	ANTAR JAYA	310,802,100	62,160,420	124,320,840	124,320,840
173	MARABAHAN	ANTAR RAYA	377,062,200	75,412,440	150,824,880	150,824,880
174	MARABAHAN	SIDO MAKMUR	306,727,600	61,345,520	122,691,040	122,691,040
175	MARABAHAN	KARYA MAJU	308,764,800	61,752,960	123,505,920	123,505,920
176	WANARAYA	KOLAM KIRI	368,913,300	73,782,660	147,565,320	147,565,320
177	WANARAYA	ROHAM RAYA	368,913,300	73,782,660	147,565,320	147,565,320
178	WANARAYA	SIMPANG JAYA	366,876,000	73,375,200	146,750,400	146,750,400
179	WANARAYA	TUMIH	306,727,600	61,345,520	122,691,040	122,691,040
180	WANARAYA	PINANG HABANG	366,876,000	73,375,200	146,750,400	146,750,400
181	WANARAYA	WARINGIN KENCANA	306,727,600	61,345,520	122,691,040	122,691,040
182	WANARAYA	BABAT RAYA	306,727,600	61,345,520	122,691,040	122,691,040
183	WANARAYA	KOLAM KANAN	364,838,800	72,967,760	145,935,520	145,935,520
184	WANARAYA	SIDOMULYO	368,913,300	73,782,660	147,565,320	147,565,320
185	WANARAYA	KOLAM MAKMUR	368,913,300	73,782,660	147,565,320	147,565,320
186	WANARAYA	SURYA KANTA	368,913,300	73,782,660	147,565,320	147,565,320
187	WANARAYA	SUMBER RAHAYU	366,876,000	73,375,200	146,750,400	146,750,400
188	WANARAYA	DWIPASARI	310,802,100	62,160,420	124,320,840	124,320,840
189	JEJANGKIT	SAMPURNA	308,764,800	61,752,960	123,505,920	123,505,920
190	JEJANGKIT	JEJANGKIT BARAT	308,764,800	61,752,960	123,505,920	123,505,920
191	JEJANGKIT	BAHANDANG	310,802,100	62,160,420	124,320,840	124,320,840
192	JEJANGKIT	JEJANGKIT TIMUR	318,951,000	63,790,200	127,580,400	127,580,400
193	JEJANGKIT	CAHAYA BARU	310,802,100	62,160,420	124,320,840	124,320,840
194	JEJANGKIT	JEJANGKIT PASAR	310,802,100	62,160,420	124,320,840	124,320,840
195	JEJANGKIT	JEJANGKIT MUARA	310,802,100	62,160,420	124,320,840	124,320,840
JUMLAH			64,248,384,300	12,849,676,860	25,699,353,720	25,699,353,720

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

**KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	KECAMATAN	DESA	Alokasi Belanja Pegawai dan Insentif RT/RW	ALOKASI FORMULA								Pegu Alokasi Dana Desa (ADD) Per Desa	Pembuatan		
				Jumlah Penduduk Miskin (%)	Bobot	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Keterjangkau an	Bobot			Total Bobot	Alokasi Formula
1	TABUNGANEN	KUALA LUPAK	255,796,860	0.45	6	1,565	8	28.49	8	53.85	8	30	61,116,907	316,913,767	316,913,800
2	TABUNGANEN	SUNGAI TELAN BESAR	255,796,860	0.55	6	1,280	7	24.69	7	59.59	8	28	57,042,446	312,839,306	312,839,300
3	TABUNGANEN	SUNGAI TELAN KECIL	255,796,860	0.82	6	1,001	7	14.24	7	40.09	7	27	55,005,216	310,802,076	310,802,100
4	TABUNGANEN	TABUNGANEN MUARA	255,796,860	1.78	6	1,735	8	14.24	7	39.76	7	28	57,042,446	312,839,306	312,839,300
5	TABUNGANEN	TABUNGANEN TENGAH	255,796,860	0.23	6	1,897	8	10.44	7	34.37	7	28	57,042,446	312,839,306	312,839,300
6	TABUNGANEN	KARYA BARU	255,796,860	0.60	6	1,628	8	12.34	7	43.83	7	28	57,042,446	312,839,306	312,839,300
7	TABUNGANEN	TABUNGANEN PEMURUS	335,508,043	1.04	6	4,621	9	29.44	8	44.19	7	30	61,116,907	396,624,950	396,625,000
8	TABUNGANEN	SUNGAI TERAS DALAM	255,796,860	0.88	6	1,045	7	11.39	7	42.73	7	27	55,005,216	310,802,076	310,802,100
9	TABUNGANEN	SUNGAI JINGAH BESAR	255,796,860	0.88	6	622	6	11.39	7	40.01	7	26	52,967,986	308,764,846	308,764,900
10	TABUNGANEN	TABUNGANEN KECIL	313,908,043	5.64	7	1,000	6	2.85	6	23.49	6	25	50,930,756	364,838,798	364,838,800
11	TABUNGANEN	SEI TERAS LUAR	255,796,860	4.38	6	1,185	7	11.39	7	43.66	7	27	55,005,216	310,802,076	310,802,100
12	TABUNGANEN	SEI TELAN MUARA	255,796,860	3.42	6	780	6	9.50	6	41.47	7	25	50,930,756	306,727,615	306,727,600
13	TABUNGANEN	BERINGIN KENCANA	255,796,860	2.84	6	1,539	8	23.74	7	49.40	7	28	57,042,446	312,839,306	312,839,300
14	TABUNGANEN	TANGGUL REJO	313,908,043	1.25	6	1,821	8	25.64	8	48.20	7	29	59,079,676	372,987,719	372,987,700
15	TAMBAN	PURWOSARI II	313,908,043	2.25	6	1,324	7	8.55	6	23.50	6	25	50,930,756	364,838,798	364,838,800
16	TAMBAN	PURWOSARI I	324,708,043	1.12	6	2,273	8	14.95	7	18.89	6	27	55,005,216	379,713,259	379,713,300
17	TAMBAN	TAMBAN BANGUN	266,596,860	3.19	6	2,218	8	3.23	6	32.73	7	27	55,005,216	321,602,076	321,602,100
18	TAMBAN	TAMBAN MUARA	313,908,043	1.51	6	1,716	8	18.99	7	30.04	7	28	57,042,446	370,950,489	370,950,500
19	TAMBAN	TAMBAN KECIL	255,796,860	2.77	6	2,429	8	5.13	6	35.80	7	27	55,005,216	310,802,076	310,802,100
20	TAMBAN	TINGGIRAN II LUAR	335,508,043	2.71	6	4,589	9	10.44	7	34.19	7	29	59,079,676	394,587,719	394,587,700
21	TAMBAN	JELAPATI	335,508,043	2.02	6	6,266	10	17.09	7	32.48	7	30	61,116,907	396,624,950	396,625,000
22	TAMBAN	TAMBAN MUARA BARU	255,796,860	10.21	8	1,875	8	14.24	7	34.62	7	30	61,116,907	316,913,767	316,913,800
23	TAMBAN	PURWOSARI BARU	266,596,860	1.44	6	2,555	9	8.07	6	33.36	7	28	57,042,446	323,639,306	323,639,300
24	TAMBAN	SEKATA BARU	255,796,860	1.33	6	1,419	7	8.07	6	31.83	7	26	52,967,986	308,764,846	308,764,900
25	TAMBAN	KOANDA	255,796,860	1.26	6	1,110	7	7.60	6	23.76	6	25	50,930,756	306,727,615	306,727,600
26	TAMBAN	DAMSARI	255,796,860	2.97	6	1,094	7	8.07	6	32.22	7	26	52,967,986	308,764,846	308,764,900

NO	KECAMATAN	DESA	Alokasi Belanja Pegawai dan Insentif RT/RW	ALOKASI FORMULA										Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Per Desa	Penbantuan
				Jumlah Penduduk Miskin (%)	Bobot	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Keterjangkau an	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula		
27	TAMBAN	SIDOREJO	255,796,860	1.41	6	1,514	8	4.98	6	29.41	7	27	55,005,216	310,802,076	310,802,100
28	TAMBAN	JELAPAT BARU	324,708,043	1.15	6	2,459	8	17.09	7	41.93	7	28	57,042,446	381,750,489	381,750,500
29	TAMBAN	TAMBAN BANGUN BARU	255,796,860	0.54	6	1,046	7	3.32	6	32.71	7	26	52,967,986	308,764,846	308,764,900
30	TAMBAN	TAMBAN SARI BARU	255,796,860	18.46	9	958	6	6.17	6	34.27	7	28	57,042,446	312,839,306	312,839,300
31	ANJUR PASAR	ANDAMAN	255,796,860	13.78	8	1,448	7	3.56	6	41.84	7	28	57,042,446	312,839,306	312,839,300
32	ANJUR PASAR	HILIR MESJID	255,796,860	0.39	6	1,372	7	6.17	6	42.53	7	26	52,967,986	308,764,846	308,764,900
33	ANJUR PASAR	ANJUR PASAR KOTA	313,908,043	1.45	6	1,701	8	4.39	6	15.33	6	26	52,967,986	366,876,029	366,876,000
34	ANJUR PASAR	BANYUR	255,796,860	0.72	6	1,245	7	15.89	7	32.02	7	27	55,005,216	310,802,076	310,802,100
35	ANJUR PASAR	GANDARAYA	255,796,860	11.27	8	556	6	8.78	6	50.24	8	28	57,042,446	312,839,306	312,839,300
36	ANJUR PASAR	GANDARIA	255,796,860	0.70	6	855	6	10.80	7	43.01	7	26	52,967,986	308,764,846	308,764,900
37	ANJUR PASAR	ANJUR PASAR KOTA II	324,708,043	0.68	6	1,978	8	8.23	6	25.67	7	27	55,005,216	379,713,259	379,713,300
38	ANJUR PASAR	ANDAMAN II	255,796,860	6.03	7	1,113	7	9.02	6	41.92	7	27	55,005,216	310,802,076	310,802,100
39	ANJUR PASAR	ANJUR SEBERANG PASARII	255,796,860	20.29	9	1,342	7	10.68	7	44.68	7	30	61,116,907	316,913,767	316,913,800
40	ANJUR PASAR	ANJUR SEBERANG PASAR I	255,796,860	22.39	9	1,541	8	10.65	7	44.03	7	31	63,154,137	318,950,997	318,951,000
41	ANJUR PASAR	ANJUR PASAR LAMA	324,708,043	0.60	6	2,281	8	10.44	7	37.05	7	28	57,042,446	381,750,489	381,750,500
42	ANJUR PASAR	PANDAN SARI	255,796,860	21.00	9	577	6	3.56	6	26.25	7	28	57,042,446	312,839,306	312,839,300
43	ANJUR PASAR	MENTAREN	255,796,860	23.10	9	590	6	2.85	6	39.08	7	28	57,042,446	312,839,306	312,839,300
44	ANJUR PASAR	BARUNAI BARU	255,796,860	3.45	6	1,107	7	3.32	6	41.79	7	26	52,967,986	308,764,846	308,764,900
45	ANJUR PASAR	DANAU KARYA	255,796,860	13.94	8	621	6	7.22	6	34.05	7	27	55,005,216	310,802,076	310,802,100
46	ANJUR MUARA	ANJUR SERAPAT MUARA	255,796,860	1.29	6	1,880	8	3.80	6	49.28	7	27	55,005,216	310,802,076	310,802,100
47	ANJUR MUARA	ANJUR MUARA KOTA	324,708,043	0.34	6	1,418	7	4.75	6	20.26	6	25	50,930,756	375,638,798	375,638,800
48	ANJUR MUARA	PATIH MUHIR	255,796,860	3.14	6	899	6	7.18	6	52.41	8	26	52,967,986	308,764,846	308,764,900
49	ANJUR MUARA	ANJUR MUARA KOTATENGAH	324,708,043	17.33	9	2,295	8	6.65	6	37.01	7	30	61,116,907	385,824,950	385,825,000
50	ANJUR MUARA	ANJUR SERAPAT LAMA	255,796,860	1.53	6	1,155	7	9.50	6	39.09	7	26	52,967,986	308,764,846	308,764,900
51	ANJUR MUARA	ANJUR SERAPAT BARU	255,796,860	6.69	7	1,705	8	11.39	7	43.39	7	29	59,079,676	314,876,536	314,876,500
52	ANJUR MUARA	ANJUR MUARA LAMA	313,908,043	0.20	6	2,162	8	5.70	6	24.62	6	26	52,967,986	366,876,029	366,876,000
53	ANJUR MUARA	SUNGAI PUNGU	255,796,860	11.97	8	1,355	7	3.80	6	41.24	7	28	57,042,446	312,839,306	312,839,300
54	ANJUR MUARA	ANJUR SERAPAT BARU I	255,796,860	0.35	6	1,556	8	11.39	7	47.36	7	28	57,042,446	312,839,306	312,839,300
55	ANJUR MUARA	PATIH MUHIR BARU	255,796,860	3.43	6	934	6	7.12	6	41.35	7	25	50,930,756	306,727,615	306,727,500
56	ANJUR MUARA	SEI PUNGU BARU	255,796,860	7.02	7	1,644	8	5.70	6	46.63	7	28	57,042,446	312,839,306	312,839,300
57	ANJUR MUARA	ANJUR SERAPAT MUARA I	255,796,860	1.42	6	2,228	8	14.72	7	34.47	7	28	57,042,446	323,639,306	323,639,300
58	ANJUR MUARA	SEPAKAT BARASAMA	255,796,860	5.59	7	576	6	9.02	6	42.93	7	26	52,967,986	308,764,846	308,764,900
59	ANJUR MUARA	MARABAHAN BARU	255,796,860	3.29	6	1,331	7	4.75	6	39.39	7	26	52,967,986	308,764,846	308,764,900
60	ANJUR MUARA	BERINGIN JAYA	255,796,860	1.22	6	1,209	7	5.93	6	32.45	7	26	52,967,986	308,764,846	308,764,900
61	ALALAK	PULAU ALALAK	277,396,860	0.29	6	3,274	9	1.15	6	35.20	7	28	57,042,446	334,439,306	334,439,300
62	ALALAK	PULAU SEWANGI	266,596,860	0.27	6	2,524	9	0.52	6	40.55	7	28	57,042,446	323,639,306	323,639,300

NO	KECAMATAN	DESA	Alokasi Belanja Pegawai dan Insentif RT/RW	ALOKASI FORMULA										Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Per Desa	Pembuatan
				Jumlah Penduduk Miskin (%)	Bobot	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Keterjangkau an	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula		
63	ALALAK	PULAU SUGARA	266,596,860	0.98	6	2,775	9	0.53	6	38.43	7	28	57,042,446	323,639,306	323,639,300
64	ALALAK	SUNGAI LUMBAH	324,708,043	0.53	6	2,582	9	6.65	6	33.68	7	28	57,042,446	381,750,489	381,750,500
65	ALALAK	BERANGAS TIMUR	335,508,043	2.72	6	6,070	10	3.80	6	27.93	7	29	59,079,676	394,587,719	394,587,700
66	ALALAK	SEI SEMANGAT BHAKTI	255,796,860	27.34	10	1,365	7	3.32	6	40.95	7	30	61,116,907	316,913,767	316,913,800
67	ALALAK	SUNGAI PITUNG	255,796,860	0.89	6	1,049	7	11.32	7	41.35	7	27	55,005,216	310,802,076	310,802,100
68	ALALAK	BELANDEAN MUARA	255,796,860	0.50	6	1,309	7	8.19	6	35.17	7	26	52,967,986	308,764,846	308,764,800
69	ALALAK	BELANDEAN	255,796,860	0.64	6	1,483	7	16.01	7	40.91	7	27	55,005,216	310,802,076	310,802,100
70	ALALAK	TANJUNG HARAPAN	255,796,860	2.37	6	1,008	7	6.65	6	37.61	7	26	52,967,986	308,764,846	308,764,800
71	ALALAK	SEMANGAT DALAM	335,508,043	1.11	6	15,415	10	7.12	6	32.38	7	29	59,079,676	394,587,719	394,587,700
72	ALALAK	BERINGIN	335,508,043	0.56	6	3,128	9	5.22	6	36.78	7	28	57,042,446	392,550,489	392,550,400
73	ALALAK	SEMANGAT KARYA	255,796,860	26.09	10	1,323	7	3.32	6	30.65	7	30	61,116,907	316,913,767	316,913,800
74	ALALAK	PANCA KARYA	255,796,860	11.86	8	821	6	4.27	6	45.15	7	27	55,005,216	310,802,076	310,802,100
75	ALALAK	TATAH MESJID	277,396,860	28.45	10	3,180	9	3.32	6	42.80	7	32	65,191,367	342,588,227	342,588,200
76	MANDASTANA	TERANTANG	266,596,860	23.31	9	2,061	8	7.60	6	48.91	7	30	61,116,907	327,713,767	327,713,800
77	MANDASTANA	TANPAH	255,796,860	1.50	6	1,013	7	6.17	6	45.66	7	26	52,967,986	308,764,846	308,764,800
78	MANDASTANA	PUNTUK LUAR	255,796,860	0.51	6	1,727	8	9.97	6	38.26	7	27	55,005,216	310,802,076	310,802,100
79	MANDASTANA	PUNTUK DALAM	255,796,860	8.17	7	1,226	7	11.44	7	43.58	7	28	57,042,446	312,839,306	312,839,300
80	MANDASTANA	TABING RIMBAH	324,708,043	1.81	6	1,980	8	17.09	7	28.93	7	28	57,042,446	381,750,489	381,750,500
81	MANDASTANA	PANTAI HAMBAWANG	255,796,860	16.05	9	765	6	10.44	7	50.40	8	30	61,116,907	316,913,767	316,913,800
82	MANDASTANA	TATAH ALAYUNG	255,796,860	1.16	6	922	6	11.39	7	35.25	7	26	52,967,986	308,764,846	308,764,800
83	MANDASTANA	PUNTUK TENGAH	313,908,043	2.60	6	1,907	8	9.50	6	36.07	7	27	55,005,216	368,913,259	368,913,300
84	MANDASTANA	LOKRAWA	255,796,860	0.59	6	1,239	7	7.60	6	43.68	7	26	52,967,986	308,764,846	308,764,800
85	MANDASTANA	SEI RAMANIA	255,796,860	18.68	9	560	6	4.75	6	42.35	7	28	57,042,446	312,839,306	312,839,300
86	MANDASTANA	BANGKIT BARU	255,796,860	0.94	6	729	6	11.39	7	47.07	7	26	52,967,986	308,764,846	308,764,800
87	MANDASTANA	ANTASAN SEGERA	255,796,860	2.46	6	828	6	9.50	6	51.33	8	26	52,967,986	308,764,846	308,764,800
88	MANDASTANA	KARANG BUNGA	266,596,860	0.27	6	2,042	8	7.62	6	44.95	7	27	55,005,216	321,602,076	321,602,100
89	MANDASTANA	KARANG INDAH	313,908,043	3.39	6	1,234	7	4.67	6	35.53	7	26	52,967,986	366,876,029	366,876,000
90	RANTAU BADAUH	SUNGAI PANTAI	324,708,043	0.45	6	2,107	8	37.28	8	33.00	7	29	59,079,676	383,787,719	383,787,700
91	RANTAU BADAUH	PINDAHAN BARU	313,908,043	0.35	6	1,603	8	29.57	8	40.40	7	29	59,079,676	372,987,719	372,987,700
92	RANTAU BADAUH	SUNGAI GAMPA ASAH	313,908,043	10.84	8	2,128	8	36.19	8	19.45	6	30	61,116,907	375,024,950	375,025,000
93	RANTAU BADAUH	SUNGAI GAMPA	324,708,043	0.77	6	2,683	9	7.60	6	41.79	7	28	57,042,446	381,750,489	381,750,500
94	RANTAU BADAUH	SUNGAI SAHURAI	255,796,860	1.02	6	1,913	8	39.88	8	43.40	7	29	59,079,676	314,876,536	314,876,500
95	RANTAU BADAUH	SIMPANG ARJA	255,796,860	14.08	8	966	6	27.54	8	39.65	7	29	59,079,676	314,876,536	314,876,500
96	RANTAU BADAUH	SINAR BARU	255,796,860	0.61	6	1,803	8	22.12	7	39.24	7	28	57,042,446	312,839,306	312,839,300
97	RANTAU BADAUH	SUNGAI BAMBAN	313,908,043	7.23	7	1,106	7	25.64	8	39.66	7	29	59,079,676	372,987,719	372,987,700
98	RANTAU BADAUH	DANDA JAYA	335,508,043	1.14	6	3,398	9	22.79	7	36.00	7	29	59,079,676	394,587,719	394,587,700

NO	KECAMATAN	DESA	Alokasi Belanja Pegawai dan Insentif RT/RW	ALOKASI FORMULA								Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Per Desa	Penbantuan		
				Jumlah Penduduk Miskin (%)	Bobot	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Keterjangkau an	Bobot			Total Bobot	Alokasi Formula
99	BELAWANG	MURUNG KERAMAT	255,796,860	14.03	8	861	6	5.89	6	56.36	8	28	57,042,446	312,839,306	312839,300
100	BELAWANG	SUNGA SELUANG	255,796,860	8.44	7	543	6	5.70	6	32.70	7	26	52,967,986	308,764,846	308764,800
101	BELAWANG	BELAWANG	313,908,043	1.54	6	1,571	8	6.65	6	25.02	7	27	55,005,216	368,913,259	368913,300
102	BELAWANG	BAMBANGIN	255,796,860	1.27	6	795	6	3.80	6	37.83	7	25	50,930,756	306,727,615	306727,600
103	BELAWANG	SUKARAMAI	255,796,860	0.52	6	1,222	7	4.75	6	39.24	7	26	52,967,986	308,764,846	308764,800
104	BELAWANG	SUNGA SELUANG PASAR	313,908,043	4.86	6	1,280	7	4.27	6	27.72	7	26	52,967,986	366,876,029	366876,000
105	BELAWANG	SAMUDA	255,796,860	1.07	6	1,221	7	9.02	6	51.61	8	27	55,005,216	310,802,076	310802,100
106	BELAWANG	PARIMATA	255,796,860	0.56	6	1,196	7	9.50	6	37.52	7	26	52,967,986	308,764,846	308764,800
107	BELAWANG	KARANG DUKUH	255,796,860	8.47	7	1,118	7	3.80	6	49.18	7	27	55,005,216	310,802,076	310802,100
108	BELAWANG	PATIH SELERA	255,796,860	0.69	6	1,726	8	9.26	6	52.74	8	28	57,042,446	312,839,306	312839,300
109	BELAWANG	KARANG BUAH	255,796,860	0.57	6	763	6	3.80	6	37.27	7	25	50,930,756	306,727,615	306727,600
110	BELAWANG	BINAN BARU	255,796,860	3.95	6	1,088	7	5.70	6	35.37	7	26	52,967,986	308,764,846	308764,800
111	BELAWANG	RANGGA SURYA	255,796,860	1.66	6	1,222	7	4.98	6	54.68	8	27	55,005,216	310,802,076	310802,100
112	CERBON	SUNGAI KAMBAT	255,796,860	1.49	6	1,409	7	30.38	8	36.63	7	28	57,042,446	312,839,306	312839,300
113	CERBON	SUNGAI RASAU	255,796,860	1.49	6	1,168	7	26.59	8	45.73	7	28	57,042,446	312,839,306	312839,300
114	CERBON	SIMPANG NUNGI	255,796,860	3.74	6	1,629	8	18.52	7	38.07	7	28	57,042,446	312,839,306	312839,300
115	CERBON	SAWMAHAN	255,796,860	14.91	8	1,132	7	56.07	9	43.55	7	31	63,154,137	318,950,997	318951,000
116	CERBON	BANTUL	324,708,043	0.30	6	2,384	8	16.76	7	29.14	7	28	57,042,446	381,750,489	381750,500
117	CERBON	BADANDAN	255,796,860	4.33	6	1,456	7	19.13	7	35.87	7	27	55,005,216	310,802,076	310802,100
118	CERBON	SEI TUJANG	255,796,860	1.17	6	597	6	16.62	7	44.40	7	26	52,967,986	308,764,846	308764,800
119	CERBON	SEI RAYA	255,796,860	0.80	6	868	6	11.87	7	40.24	7	26	52,967,986	308,764,846	308764,800
120	BAKUMPAI	BANUA ANYAR	255,796,860	1.30	6	1,267	7	18.04	7	44.45	7	27	55,005,216	310,802,076	310802,100
121	BAKUMPAI	MURUNG RAYA	255,796,860	0.74	6	1,196	7	13.29	7	46.28	7	27	55,005,216	310,802,076	310802,100
122	BAKUMPAI	PALUNGKAU	255,796,860	25.73	10	780	6	56.02	9	56.73	8	33	67,228,597	323,025,457	323025,500
123	BAKUMPAI	BALUKUNG	255,796,860	0.78	6	1,040	7	42.73	8	59.76	8	29	59,079,676	314,876,536	314876,500
124	BAKUMPAI	BANITAN	255,796,860	2.19	6	944	6	52.22	9	64.51	8	29	59,079,676	314,876,536	314876,500
125	BAKUMPAI	BATIK	255,796,860	2.84	6	1,370	7	7.60	6	32.96	7	26	52,967,986	308,764,846	308764,800
126	BAKUMPAI	BAHALAYUNG	255,796,860	2.47	6	894	6	19.94	7	40.60	7	26	52,967,986	308,764,846	308764,800
127	BAKUMPAI	SUNGA SELIRIK	255,796,860	23.38	9	521	6	17.09	7	46.65	7	29	59,079,676	314,876,536	314876,500
128	KURIPAN	JAMBU BARU	255,796,860	29.51	10	623	6	79.76	10	56.67	8	34	69,265,828	325,062,687	325062,700
129	KURIPAN	JAMBU	255,796,860	14.46	8	612	6	34.18	8	41.99	7	29	59,079,676	314,876,536	314876,500
130	KURIPAN	KABAU	255,796,860	45.43	10	633	6	22.79	7	34.04	7	30	61,116,907	316,913,767	316913,800
131	KURIPAN	JARENANG	255,796,860	5.03	7	514	6	23.74	7	45.01	7	27	55,005,216	310,802,076	310802,100
132	KURIPAN	TABATAN	255,796,860	19.80	9	976	6	93.05	10	33.15	7	32	65,191,367	320,988,227	320988,200
133	KURIPAN	KURIPAN	255,796,860	7.51	7	720	6	21.36	7	39.53	7	27	55,005,216	310,802,076	310802,100
134	KURIPAN	TABATAN BARU	255,796,860	12.73	8	1,041	7	66.94	9	53.78	8	32	65,191,367	320,988,227	320988,200

ALOKASI FORMULA															
NO	KECAMATAN	DESA	Alokasi Belanja Pegawai dan Insentif RT/RW	Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Keterjangkauan	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Per Desa	Pembuatan
				Miskin (%)											
135	KURIPAN	ASIA BARU	255,796,860	17.56	9	536	6	22.79	7	49.19	7	29	59,079,676	314,876,536	314,876,500
136	KURIPAN	RIMBUN TULANG	255,796,860	8.70	7	643	6	21.36	7	22.82	6	26	52,967,986	308,764,846	308,764,800
137	TABUKAN	PANTANG RAYA	255,796,860	8.06	7	1,032	7	13.29	7	39.08	7	28	57,042,446	312,839,306	312,839,300
138	TABUKAN	TABUKAN RAYA	313,908,043	2.05	6	1,074	7	0.29	6	38.97	7	26	52,967,986	366,876,029	366,876,000
139	TABUKAN	TELUK TAMBA	313,908,043	6.31	7	944	6	11.49	7	37.26	7	27	55,005,216	368,913,259	368,913,300
140	TABUKAN	RANTAU BAMBAN	255,796,860	1.10	6	605	6	11.39	7	64.36	8	27	55,005,216	310,802,076	310,802,000
141	TABUKAN	TAMBA JAYA	255,796,860	2.73	6	359	6	33.71	8	53.28	8	28	57,042,446	312,839,306	312,839,300
142	TABUKAN	MUARA PULAU	255,796,860	45.06	10	1,078	7	29.44	8	67.89	8	33	67,228,597	323,025,457	323,025,500
143	TABUKAN	KARYA INDAH	255,796,860	31.52	10	557	6	5.28	6	51.64	8	30	61,116,907	316,913,767	316,913,800
144	TABUKAN	BANDAR KARYA	255,796,860	0.84	6	905	6	1.50	6	47.03	7	25	50,930,756	306,727,615	306,727,500
145	TABUKAN	KARYA MAKMUR	255,796,860	1.07	6	1,433	7	23.41	7	48.21	7	27	55,005,216	310,802,076	310,802,100
146	TABUKAN	KARYA JADI	313,908,043	2.07	6	997	6	14.53	7	37.84	7	26	52,967,986	366,876,029	366,876,000
147	TABUKAN	PANTANG BARU	255,796,860	1.25	6	795	6	13.29	7	49.31	7	26	52,967,986	308,764,846	308,764,800
148	TABUKAN	MEKARSARI	335,508,043	1.83	6	3,215	9	12.34	7	24.51	6	28	57,042,446	325,676,536	325,676,500
149	MEKARSARI	TAMBAN RAYA	266,596,860	1.23	6	2,118	8	26.84	8	31.62	7	29	59,079,676	310,802,076	310,802,100
150	MEKARSARI	TINGGIRAN TENGAH	255,796,860	3.27	6	1,132	7	23.74	7	44.41	7	27	55,005,216	325,676,536	325,676,500
151	MEKARSARI	TINGGIRAN DARAT	266,596,860	1.76	6	3,213	9	18.99	7	31.93	7	29	59,079,676	316,913,767	316,913,800
152	MEKARSARI	JELAPAT II	255,796,860	5.65	7	2,031	8	28.96	8	28.99	7	30	61,116,907	314,876,536	314,876,500
153	MEKARSARI	TAMBAN RAYA BARU	255,796,860	22.28	9	1,374	7	9.50	6	30.90	7	29	59,079,676	336,476,536	336,476,500
154	MEKARSARI	TINGGIRAN BARU	277,396,860	2.00	6	3,784	9	14.24	7	35.61	7	29	59,079,676	310,802,076	310,802,100
155	MEKARSARI	KARANG MEKAR	255,796,860	3.69	6	1,118	7	13.29	7	34.14	7	27	55,005,216	306,727,615	306,727,500
156	MEKARSARI	INDAH SARI	255,796,860	1.24	6	949	6	8.55	6	42.94	7	25	50,930,756	370,950,489	370,950,500
157	BARAMBAL	BARAMBAL	313,908,043	0.38	6	1,783	8	17.09	7	32.19	7	28	57,042,446	372,987,719	372,987,700
158	BARAMBAL	SUNGAI KALI	313,908,043	1.37	6	1,670	8	28.49	8	44.35	7	29	59,079,676	310,802,076	310,802,100
159	BARAMBAL	PENDALAMAN	255,796,860	0.97	6	1,590	8	8.55	6	39.03	7	27	55,005,216	306,727,615	306,727,500
160	BARAMBAL	HANDIL BARABAI	255,796,860	1.35	6	662	6	9.50	6	39.56	7	25	50,930,756	314,876,536	314,876,500
161	BARAMBAL	BAGAGAP	255,796,860	0.83	6	1,553	8	30.38	8	45.88	7	29	59,079,676	314,876,536	314,876,500
162	BARAMBAL	BARAMBAL KARYA TANI	255,796,860	2.31	6	1,221	7	42.14	8	52.16	8	29	59,079,676	310,802,076	310,802,100
163	BARAMBAL	PENDALAMAN BARU	255,796,860	4.27	6	1,648	8	6.65	6	42.41	7	27	55,005,216	314,876,536	314,876,500
164	BARAMBAL	KARYA BARU	255,796,860	29.50	10	612	6	6.65	6	48.52	7	29	59,079,676	381,750,489	381,750,500
165	BARAMBAL	BARAMBAL KOLAM KIRI	324,708,043	2.86	6	2,473	8	15.19	7	43.15	7	28	57,042,446	312,839,306	312,839,300
166	BARAMBAL	BARAMBAL KOLAM KANAN	255,796,860	1.49	6	1,699	8	17.09	7	35.60	7	28	57,042,446	370,950,489	370,950,500
167	BARAMBAL	BARAMBAL KOLAM KIRIDALAM	313,908,043	2.67	6	1,940	8	16.14	7	40.04	7	25	50,930,756	364,838,798	364,838,800
168	MARABAHAN	PENGHULU	313,908,043	4.34	6	598	6	1.54	6	25.75	7	25	50,930,756	370,950,489	370,950,500
169	MARABAHAN	BAGUS	313,908,043	21.31	9	1,064	7	9.97	6	22.15	6	28	57,042,446	306,727,615	306,727,500
170	MARABAHAN	BALUK	255,796,860	3.80	6	598	6	4.75	6	35.37	7	25	50,930,756	306,727,615	306,727,500

NO	KECAMATAN	DESA.	Alokasi Belanja Pegawai dan Insentif RT/RW	ALOKASI FORMULA										Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Per Desa	Perhitungan
				Jumlah Penduduk Miskin (%)	Bobot	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Keterjangkauan	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula		
171	MARABAHAN	ANTAR BARU	255,796,860	2.66	6	1,139	7	23.21	7	45.18	7	27	55,005,216	310,802,076	310,802,100
172	MARABAHAN	ANTAR JAYA	255,796,860	1.78	6	968	6	27.54	8	45.37	7	27	55,005,216	310,802,076	310,802,100
173	MARABAHAN	ANTAR RAYA	313,908,043	18.40	9	1,020	7	30.24	8	45.00	7	31	63,154,137	377,062,180	377,062,200
174	MARABAHAN	SIDO MAKMUR	255,796,860	0.54	6	893	6	7.60	6	38.46	7	25	50,930,756	306,727,615	306,727,500
175	MARABAHAN	KARYA MAJU	255,796,860	1.69	6	641	6	5.27	6	55.07	8	26	52,967,986	308,764,846	308,764,800
176	WANARAYA	KOLAM KIRI	313,908,043	1.61	6	1,529	8	2.37	6	29.08	7	27	55,005,216	368,913,259	368,913,300
177	WANARAYA	ROHAM RAYA	313,908,043	1.56	6	2,011	8	4.27	6	32.94	7	27	55,005,216	368,913,259	368,876,000
178	WANARAYA	SIMPANG JAYA	313,908,043	0.45	6	1,098	7	2.37	6	37.62	7	26	52,967,986	366,876,029	366,876,000
179	WANARAYA	TUMIH	255,796,860	4.29	6	872	6	4.27	6	46.47	7	25	50,930,756	306,727,615	306,727,500
180	WANARAYA	PINANG HABANG	313,908,043	4.66	6	1,070	7	2.37	6	40.12	7	26	52,967,986	366,876,029	366,876,000
181	WANARAYA	WARINGIN KENCANA	255,796,860	0.74	6	760	6	2.37	6	43.93	7	25	50,930,756	306,727,615	306,727,500
182	WANARAYA	BABAT RAYA	255,796,860	2.35	6	684	6	3.32	6	34.04	7	25	50,930,756	306,727,615	306,727,500
183	WANARAYA	KOLAM KANAN	313,908,043	1.83	6	994	6	7.12	6	33.11	7	25	50,930,756	364,838,798	364,838,800
184	WANARAYA	SIDOMULYO	313,908,043	1.46	6	1,762	8	4.37	6	34.70	7	27	55,005,216	368,913,259	368,913,300
185	WANARAYA	KOLAM MAKMUR	313,908,043	0.60	6	2,033	8	9.02	6	48.39	7	27	55,005,216	368,913,259	368,913,300
186	WANARAYA	SURYA KANTA	313,908,043	0.60	6	1,564	8	4.27	6	40.34	7	27	55,005,216	368,913,259	368,913,300
187	WANARAYA	SUMBER RAHAYU	313,908,043	1.46	6	1,032	7	9.02	6	36.83	7	26	52,967,986	366,876,029	366,876,000
188	WANARAYA	DWIPASARI	255,796,860	3.86	6	661	6	15.67	7	54.22	8	27	55,005,216	310,802,076	310,802,100
189	JEJANGKIT	SAMPURNA	255,796,860	1.52	6	851	6	17.09	7	39.67	7	26	52,967,986	308,764,846	308,764,800
190	JEJANGKIT	JEJANGKIT BARAT	255,796,860	2.08	6	940	6	19.94	7	38.22	7	26	52,967,986	310,802,076	310,802,100
191	JEJANGKIT	BAHANDANG	255,796,860	1.10	6	558	6	17.09	7	63.77	8	27	55,005,216	318,950,997	318,951,000
192	JEJANGKIT	JEJANGKIT TIMUR	255,796,860	1.17	6	1,178	7	113.94	10	52.75	8	31	63,154,137	310,802,076	310,802,100
193	JEJANGKIT	CAHAYA BARU	255,796,860	1.90	6	1,259	7	9.50	6	55.76	8	27	55,005,216	310,802,076	310,802,100
194	JEJANGKIT	JEJANGKIT PASAR	255,796,860	3.29	6	1,440	7	18.99	7	32.11	7	27	55,005,216	310,802,076	310,802,100
195	JEJANGKIT	JEJANGKIT MUARA	255,796,860	0.61	6	1,356	7	11.39	7	36.84	7	27	55,005,216	310,802,076	310,802,100
JUMLAH			53,308,458,006	10.88	-	281,854	-	2,858.67	-	7,806.93	-	5,370	10,939,926,294	64,248,384,300	64,248,384,300

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa (ADD)	64,248,384,300
Kebutuhan Belanja Pegawai - Insentif RT/RW	53,308,458,006
Pagu Alokasi Formula	10,939,926,294
Jumlah Desa	195


 HJ. NOORMILLANI AS.

BUPATI BARITO KUALA,